



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 50 / Kpts / KP.430 / B / 11 / 2021

TENTANG

PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b. bahwa dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah ditetapkan Pengelola Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN.**

- KESATU : Aparatur Sipil Negara yang wajib lapor harta kekayaan penyelenggara negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Aparatur Sipil Negara yang wajib lapor harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
1. Pejabat Eselon I;
  2. Pejabat Eselon II;
  3. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM); dan
  4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.
- KETIGA : Dalam hal Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang tidak melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2021

DIREKTUR JENDERAL,



AGUS AMIL

NIP 196508301998031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN  
SARANA PERTANIAN  
NOMOR 50 / Kpts / KP. 480 / B / 11 / 2021  
TENTANG  
PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT  
JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Unit Kerja
1.	Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. NIP 196508301998031001	Pembina Utama Madya IV/d	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
2.	Gunawan, S.P., M.Si. NIP 197407081998031002	Pembina TK.1 IV/b	Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian/ Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
3.	Erwin Noorwibowo, S.T.P. NIP 196911231998031003	Pembina TK.1 IV/b	Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

4.	Ir. Rahmanto, M.Sc. NIP 196811061994031001	Pembina Utama Muda IV/c	Direktur Irigasi Pertanian/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Irigasi Pertanian	Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
5.	Ir. Indah Megahwati, M.P. NIP 196801151993032001	Pembina Utama Muda IV/c	Direktur Pembiayaan Pertanian/ Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembiayaan Pertanian	Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
6.	Muhammad Hatta, S.S.T.P. NIP 198106182000121003	Pembina TK.I IV/c	Direktur Pupuk dan Pestisida/ Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida	Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
7.	Andi Nur Alam Syah, S.T.P., M.T. NIP197502012002121001	Pembina Utama Muda IV/c	Direktur Alat dan Mesin Pertanian/ Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
8.	Ony Wiryawan, S.T., M.Sc. NIP 197002102002121001	Pembina IV/a	Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
9.	Arpin, S.P. NIP 196908212002121001	Penata III/c	Pejabat Pembuat Komitmen Pilot Percontohan Pengembangan dan Pengelolaan Lahan Pertanian Modern	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
10.	Diana Nur Fatimah, S.P. NIP 198404042003122002	Penata III/c	Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri <i>Flood Management in Selected River Basins</i> serta Pelaksanaan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Jalan Usaha Tani	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
11.	Lukman Irwanto, S.E., M.AP.	Penata TK.I III/d	Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

12.	Emir Kartarajasa, S.T., M.T.	Pembina IV/a	Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Padat Karya Produktif Infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian Aspek Irigasi Pertanian	Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
13.	Farakka Sari, S.T.P., M.Sc. NIP 197704062005012001	Pembina IV/a	Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri <i>Upland Development For Food Security</i>	Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
14.	Drs. Sutrisno Nugroho, M.M. NIP. 196306191988031001	Pembina TK. I IV/b	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
15.	Puguh Hari Prabowo, S.E. NIP 198211182006041008	Penata Muda III/a	Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
16.	Leli Eka Rismawati, S.E. NIP 198401102008012009	Penata TK.I III/d	Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
17.	Gunadi, S.E. NIP 196912082003121001	Penata TK.I III/d	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem <i>e-Purchasing/e-Catalog</i> , Pengadaan Langsung, dan Penunjukan Langsung, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
18.	Hendri Y. Rahman, S.T.P. NIP 197012072006041013	Penata III/c	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem <i>e-Purchasing/e-Catalog</i> , Pengadaan Langsung, dan Penunjukan Langsung, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

19.	Djati Kuntjoro, S.Komp. NIP 197103221999031001	Penata TK.I III/d	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem <i>e-Purchasing/e-Catalog</i> , Pengadaan Langsung, dan Penunjukan Langsung, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
20.	German Silaen, S.E., M.M. NIP 196509121997031001	Pembina IV/a	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem <i>E-Purchasing/E-Catalog</i> , Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
21.	Muhammad Ikhwani, S.E., M.M. NIP 197904072002121001	Pembina TK.I IV/b	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem <i>E-Purchasing/E-Catalog</i> , Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung, Direktorat Pembiayaan Pertanian	Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
22.	Risda Sinaga, S.P., M.Si NIP 196906011998032001	Pembina IV/a	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem <i>E-Purchasing/E-Catalog</i> , Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung, Direktorat Irigasi Pertanian	Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
23.	Erna Riyanti Wardhani, S.Pt. NIP 197410221999032001	Pembina IV/a	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem <i>E-Purchasing/E-Catalog</i> , Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
24.	Yanti Ermawati, S.P., M.Si NIP 197201081998032001	Pembina TK.I IV/b	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan Subsidi Pupuk	Direktorat Pupuk dan Pesticida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

25.	Nunuk Hermin Yanuwati, S.Sos. NIP 197301301999032001	Penata TK.I III/d	Bendahara Pengeluaran Kegiatan Pengelolaan Subsidi Pupuk	Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
-----	---	----------------------	---	--



DIREKTUR JENDERAL,

ALIAS MIL

NIP 196508301998031001